

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Investor Daily

Wilayah Berita : BPK Jateng

Halaman 2

Opini WTP Pemerintah Daerah Meningkatkan

SEMARANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menggelar Media Workshop dengan tema "Mekanisme Pemberian Opini Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Dana Desa", Rabu (18/10) kemarin. Kegiatan diikuti sekitar 70 awak media dari beberapa media massa baik media lokal maupun media nasional di lantai III gedung BPK.

Dalam kesempatan itu Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo menjelaskan cara kerja BPK dalam melakukan pemeriksaan terkait penggunaan uang pemerintah. Selain memeriksa atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

"Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan memuat opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Opini adalah pernyataan profesional



WORKSHOP: Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hery Subowo saat memberikan pemaparan cara kerja BPK dalam menentukan pemberian opini terhadap laporan keuangan daerah.

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan," ujarnya.

Dijelaskan Hery, bahwa hasil penilaian

ada empat opini yang akan diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah. Keempat jenis opini tersebut adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer), dan Tidak Wajar (adverse).

"Penentuan pemberian opini BPK didasarkan beberapa kriteria diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas dalam pengendalian intern," jelasnya.

Disebutkan dalam tiga tahun terakhir pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Tengah mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2014 tercatat dari 36 LKPD sebanyak 12 memperoleh opini WTP, dan 24 memperoleh opini WDP. Pada tahun 2015 tercatat dari 21 LKPD pemerintah daerah memperoleh penilaian WTP, dan 15 LKPD memperoleh penilaian WDP. **(muz)**